

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PBB PP (PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN) DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**
(Studi Analisis di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Rizka Dwi Astuti

NPM 1451010102

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PBB PP (PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOAN) DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

(Studi Analisis di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**Rizka Dwi Astuti
NPM 1451010102**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Syamsul Hilal, S.Ag. M.Ag
Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E.M.Sak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

PBB PP sebagai salah satu komponen yang mendukung dan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana yang akan diterima oleh daerah. Oleh karena itu, PBB PP perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi yang diberikan oleh penerimaan PBB PP bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB PP harus dilakukan secara efektif. Dalam meningkatkan kontribusi PBB PP terhadap PAD pemerintah harus mengupayakan supaya masyarakat wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan cara mensosialisasikan perpajakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan adanya kesenjangan teori dan praktik, disini penulis menggunakan teori yang di paparkan oleh Mustafa mengenai sosialisasi, yaitu “satu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”. Seharusnya setelah dilakukan sosialisasi, wajib pajak lebih memahami dan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, namun di Kecamatan Jati Agung setelah dilakukan sosialisasi masih saja ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB PP, bagaimana dampak penerimaan PBB PP terhadap peningkatan PAD, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap PAD yang bersumber dari PBB PP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB PP, untuk menganalisis dampak penerimaan PBB PP terhadap peningkatan PAD, untuk menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap PAD yang bersumber dari PBB PP.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, data sekunder di peroleh dari BPS. Pengelolaan data dilakukan melalui editing dan sistematisasi data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Sehingga didapat kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PBB PP berdampak positif namun kurang optimal kontribusinya dalam meningkatkan PAD dilihat dari kontribusi pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,24 %, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,15%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,65% hal ini bersifat fluktuatif dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Di samping untuk mencapai target PBB PP pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam menyadarkan wajib pajak. Dimana peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi perpajakan satu tahun sekali. Pandangan ekonomi Islam mengenai PAD yang bersumber dari PBB dibolehkan dalam Islam selagi tidak di pungut dengan cara yang batil dan sesuai peraturan pemerintah, dan undang-undang.

Keywords: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Badan Pusat Statistik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Tlpn (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan
PBB PP (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
Perkotaan) dan Dampaknya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa

: Rizka Dwi Astuti

NPM

: 1451010102

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Syamsul Hilak, S.Ag., M.Ag.
NIP. -

Pembimbing II


Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin., Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Tlpn (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan PBB PP (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh **Rizka Dwi Astuti**, NPM: **1451010102**, Jurusan **Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 06 September 2018

TIM MUNAQOSYAH

Ketua sidang : **Hanif, S.E, M.M**

Penguji 1 : **Muhammad Iqbal, M.E.I**

Penguji 2 : **Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

Sekretaris : **Dinda Fali Rifan, M.Ak**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Moh Bahrudin., M.Ag
NIP. 19580824 1989031003

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan hartadan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah:41)



PERSEMABAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang paling terdalam penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya Bapak Daryono dan Ibu Aminah, kepada Mertua saya Bapak Wasman dan Ibu Temu. Yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkan sepuh jiwa raga, merawat, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kepada suamiku terkasih Riga Dwi Nugraha, yang selalu memberi semangat yang selalu mendukung apa yang saya lakukan, selalu menguatkan, menyayangi dan selalu mendoakan saya.
3. Untuk kakak- kakak saya tersayang, Cici Murdiani, S.Pd, Iswahyudi, ST, Reni, Mahromi dan Adik-Adik saya M. Ravi' Aldin, Bagus Tri Prayogo, dan Khoirul Raziqin yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Untuk keponakan-keponakan Ammah Yumna Syakila Isykarima, Fawwas Muzafar, Ahmad Hanan Faiz, Abizar Arfan Raqila. Yang senatiasa selalu memberi semangat, mendukung, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Almamaterku tecinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2014 khususnya kelas F yang tak hennti-hentinya memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga, kami menyebutnya Muslimah Squad, Yunensi Rika Rosanova, Feni Nur Setianingrum, Unun Udia A'la, Veka Ferliana, Istiqomah, Fitria Ratna Wulan, yang selalu mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rizka Dwi Astuti, dilahirkan di Mulyaguna, pada tanggal 13 Desember 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Daryono dan Ibu Aminah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu TK Aisiyah, SDN 2 Mulyaguna lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Teluk Gelam lulus pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah atas di SMAS Teladan Jaya yang diselesaikan pada tahun 2014.

Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui Seleksi Penerimaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPAN-PTAIN) pada tahun 2014.

Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam beberapa organisasi yaitu:

1. Anggota PRAMUKA SDN 2 Mulyaguna
2. Anggota PRAMUKA SMPN 2 Teluk Gelam
3. Anggota OSIS SMPN 2 Teluk Gelam Bidang Olahraga dan Kesehatan
4. Pemain inti TIM VOLI SMPN 2 Teluk Gelam
5. Pemain inti TIM VOLI SMAS Teladan Jaya
6. Bendahara umum OSIS SMAS Teladan Jaya
7. Wakil ketua OSIS SMAS Teladan Jaya
8. Anggota PASKIBRAKA SMAS Teladan Jaya
9. Anggota UKM ORI di UIN Raden Intan Lampung
10. Pemain inti TIM VOLI UIN Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah dalam Mensosialisasikan dan Dampak PBB PP (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Syari’ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Moh, Bahrudin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Madnasir, S.E., M.Si, dan Deky Fermansyah, S.E., M.S.I selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Syamsul Hilal, S.Ag. M.Ag selaku Pembimbing Akademik I dan Yulistia Devi, S.E.M.Sak selaku Pembimbing Akademik II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
5. Badan Pusat Statistik Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan data kepada penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini dengan baik.
6. Pemerintahan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang telah mengizinkan dan memberikan data kepada penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini dengan baik.
7. Sahabat seperjuangan khususnya kelas F Prodi Ekonomi Islam angkatan 2014 (terutama Yunensi, Feni, Isty, Unun, Veka, Wulan, Afini, Anang, Danu, Erwin, dan Ahmad) yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses skripsi, dan menemani saya bermain FF, serta teman seperjuangan dalam mengabdikan pada desa yaitu KKN 2017 kelompok 02 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Khasanah Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung,
Penulis,

Rizka Dwi Astuti
NPM. 1451010102



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul.....	1
B. AlasanMemilihJudul.....	2
C. LatarBelakang.....	4
D. RumusanMasalah.....	18
E. TujuandanManfaatPenelitian	19
F. MetodePenelitian	20
G. PenelitianTerdahulu Yang Relavan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PemerintahDaerah.....	29
1. PengertianPemerintah Daerah.....	29
2. TugasdanKewajibanPemerintah Daerah.....	31

3. RuangLingkupPeranPemerintah	34
B. SosialisasiPerpajakan.....	37
1. PengertianSosialisasi.....	37
2. Jenis-JenisSosialisasi	41
3. Keputusan Jenderal Pajak No.KEP-114/PJ/2005	43
C. PajakBumidanBangunanPedesaanPerkotaan	46
1. Pengertian PBB PP	46
2. PBB PP dalam Islam.....	48
3. SubjekdanObjekPBB PP	53
4. Cara MenghitungTarif PBB.....	56
5. MacamSanksiPerpajakan	57
6. MemahamiKeberatandan Banding dalam PBB	61
7. ProsedurPelaksanaanPendaftaranPBB PP	62
8. Tata Cara PembayarandanPenagihan PBB	65
9. <i>Kharaj</i> MetodePengambilanPajakPadaMasaRasulullah.....	66
D. PendapatanAsli Daerah.....	71
1. PengertianPendapatanAsli Daerah.....	71
2. SumberPendapatanAsli Daerah	72
3. PendapatanAsli Daerah MasaRasulullah	77

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung	81
1. Letak Geografis Kecamatan Jati Agung	81

2. Sejarah Singkat Kecamatan Jati Agung	81
3. Topografis	83
4. Demografis.....	85
B. Pemerintahan Kecamatan Jati Agung	88
C. Peran Pemerintah dalam Mensosialisasikan PBB PP	89
D. Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB	
Dan PAD di Kecamatan Jati Agung	94

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Pemerintah dalam	
Mensosialisasikan PBB PP di Kecamatan	
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	96
B. Dampak Penerimaan PBB PP Terhadap	
Peningkatan PAD di Kecamatan Jati Agung	101
C. Pandangan Islam Mengenai PAD	
Yang Bersumber -dari PBB PP.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Validasi Data Penduduk dan Jumlah Wajib Pajak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	10
2. Tabel 1.2 Daftar Hadir Sosialisasi PBB.....	12
3. Tabel 1.3 Presentasi Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Jati Agung Tahun 2014-2016.....	13
4. Tabel 1.4 Presentasi Penerimaan PBB Seluruh Desa di Kecamatan Jati Agung Tahun 2014.....	14
5. Tabel 1.5 Presentasi Penerimaan PBB Seluruh Desa di Kecamatan Jati Agung Tahun 2015.....	15
6. Tabel 1.6 Presentasi Penerimaan PBB Seluruh Desa di Kecamatan Jati Agung Tahun 2015.....	16
7. Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	17
8. Tabel 1.8 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	25
9. Tabel 3.1 Nama-Nama Desa Yang Berada di Wilayah Kecamatan Jati Agung	82
10. Tabel 3.2 Luas Desa di Kecamatan Jati Agung	84
11. Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Jati Agung.....	86
12. Tabel 3.4 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	87
13. Tabel 3.8 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan	95

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Kartu Konsultan
3. Lampiran 3 : Surat Riset
4. Lampiran 4 : Stuktur Organisasi Kecamatan Jati Agung
5. Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Kepada Penerima Sosialisasi
6. Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Kepada Ketua Kasi Pertanahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam “**Peran Pemerintah dalam Mensosialisasikan dan Dampak PBB PP (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.¹
2. Peran Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya di pemerintahan.

¹Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi, Muhammad Faisal Riza, “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”, *Jurnal Perpajakan*, h. 5

3. Sosialisasi Perpajakan merupakan upaya dari direktorat jenderal pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembiayaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.²
4. PBB PP UU Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).³
5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islami.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah untuk mensosialisasikan PBB PP dan apakah PBB PP dapat meningkatkan PAD di Kecamatan Jati Agung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :

² Risky Riyanda Rama Putra, Siti Ragil Handayani, Dan Topowijono, "Peraruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang), " *Jurnal E-Perpajakan*, Vol. 1 No. 1 2014, h. 3-4

³ Lucia S. Napitupulu., Novi Budiarto, "Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado" *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015, h.463-472

⁴ Musthafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5

1. Secara Objektif

Pemerintah daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB PP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak di Kecamatan Jati Agung. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan target penerimaan pajak khususnya tentang PBBPP dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan yang dapat membuat wajib pajak lebih memahami mengenai perpajakan dan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB PP di daerahnya.

Bagi penulis pentingnya meneliti judul skripsi ini adalah karena adanya kesenjangan teori dan praktik, disini penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Rohmawati, sosialisasi adalah “suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu”, namun setelah dilakukan sosialisasi penerimaan PBB PP di Kecamatan Jati Agung belum mencapai target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Jati Agung, wajib pajak belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi).⁵

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah,

⁵A.W.Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), h.32

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.⁶

Sumber-sumber pendapatan PAD menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang

⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.52

⁷*Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011* (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011), h. 382-386

selanjutnya disebut PBB PP dari pajak pusat menjadi pajak daerah serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB PP menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB PP.⁸

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut republik Indonesia. Pengertian bangunan dalam konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Objek dari PBB adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.⁹

⁸Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi, dan Muhammad Faisal Riza, "Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", *jurnal perpajakan*, h.1

⁹*Ibid.*, h.2

Untuk meningkatkan PAD dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang PBB PP sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah perlu mensosialisasikan PBB PP tersebut. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali, sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), *tax gathering*, kelas pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop/* bimbingan teknis.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet/ leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab,

penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/*banner/billboard* dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.¹⁰

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya.

Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Sebagai daerah otonomi,

¹⁰Agus Arianto Toly dan Marisa Herryanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan", *Tax & Accounting Review*, VOL.1, NO.1, 2013, h 18

daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Karena dengan hal tersebut akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor ekonomi.

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat 21 desa yaitu yang akan dijelaskan dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Validasi Data Penduduk dan Jumlah Wajib Pajak di Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan.

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Warga	Jumlah WP PBB PP
1.	Way Huwi	5.187	13.692	3829
2.	Jati Mulyo	4.519	15.759	4339
3.	Fajar Baru	1.902	7.419	2460
4.	Karang Sari	1.345	5.350	1396
5.	Karang Anyar	4.911	18.067	5378
6.	Rejomulyo	1.230	5.763	2954
7.	Karang Rejo	1.505	5.400	2369
8.	Marga Kaya	883	3.112	2378
9.	Marga Agung	1.403	4.269	2019
10.	Margo Lestari	815	2.977	1209
11.	Margodadi	706	2.611	1997
12.	Margo Mulyo	715	2.423	1843
13.	Margorejo	524	1.755	1179
14.	Banjar Agung	719	2.053	1256
15.	Gedung Harapan	150	699	650

16.	Gedung Agung	452	1.438	1258
17.	Sumber Jaya	1.201	4.167	1887
18.	Sidoharjo	808	2.849	1484
19.	Purwotani	626	2.278	1006
20.	Sidodadi Asri	1.664	5.523	2257
21.	Sinar Rejeki	1.968	6.469	2973
Jumlah		33.323	114.073	46123

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2018

Dimana dari ke 21 desa yang telah di sebutkan pada tabel diatas tentunya setiap daerah memiliki jumlah wajib pajak PBB PP yang berbed-beda, Adapun luas wilayah Kecamatan Jati Agung 27.931 Ha dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang.

Kecamatan Jati Agung berbatasan dengan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Natar, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Sebelumnya sudah pernah dilakukan sosialisasi di Kecamatan Jati Agung, sosialisasi dilakukan setiap tahun dalam sosialisasi tersebut dijelaskan cara pembayaran pajak, cara pengisian surat pemberitahuan objek pajak dan menjelaskan undang-undang perpajakan jika ada perubahan, peserta sosialisasi adalah pemungut pajak dari setiap desa, dan pemungut pajak dari setiap desa tersebut harus mengikuti kegiatan sosialisasi ini jika tidak maka akan diberi sangsi, di bawah ini adalah bukti telah dilakukan sosialisasi di Kecamatan Jati Agung yaitu berupa daftar hadir peserta dari setiap desa.

Tabel 1.2
Daftar Hadir
Koordinasi Penyuluhan Terkait Blangko Pendataan PBB

No	Nama	Desa	No. HP
1.	Pikril	Margodadi	082376587877
2.	Yunani	Fajar Baru	082372423122
3.	Kurniadi	Margo Lestari	085381528074
4.	Mawardi	Rejo Mulyo	081279380638
5.	Wawantoro	Margodadi	085268162549
6.	Sumardi Alwi	Way Huwi	085384627535
7.	Sisko	Jatimulyo	085373825161
8.	Mahmud	Gedung Agung	082183619428
9.	Marwoto	Marga Kaya	085268619143
10.	Riswanto	Sidodadi Asri	085381118943
11.	Bunyamin	Karang Anyar	081369121547
12.	Apriansyah	Margorejo	085669997679
13.	Richko Saputra	Margo Mulyo	085768728371
14.	Nurohman	Karang Sari	081271782435
15.	Selfi Saputri	Gedung Harapan	082269617702
16.	M. Sodikun	Sumber Jaya	081369661555
17.	Bapak Melan	Gedung Agung	085279867107
18.	Suprayidno	Way Huwi	081273169050
19.	Mulyadi	Sidoharjo	081279147044
20.	Yusuf Ardian	Sidodadi Asri	085378922169
21.	Herman	Sinar Rejeki	085379247408
22.	M. Taim	Way huwi	081278110544
23.	Kelik	Karang Anyar	081369121547
24.	Wakidi	Margakaya	085268826662

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Daftar Hadir Sosialisasi Perpajakan Tahun 2018

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, prosedur, serta waktu pembayaran PBB PP. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan nasional yang

merata dan berkesinambungan dan demi meningkatnya PAD di Kecamatan Jati Agung, karna PBB PP adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan hasil observasi lapangan pengelolaan PBB di Kecamatan Jati Agung belum mencapai Target yang diharapkan, dari pokok ketetapan PBB tiap tahunnya perolehan realisasi penerimaan tiap tahunnya tidak setabil. Ketercapaian angka realisasi selalu di bawah angka pokok ketetapan yang berarti tiap tahunnya selalu ada tunggakan pemungutan pajak, berikut tabel realisasi penerimaan PBB PP Kecamatan Jati Agung dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun.

Tabel 1.3
Persentasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati Agung dari tahun 2014 sampai dengan 2016

Tahun	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2014	601.159.640	315.817.568	52
2015	542.851.178	250.771.548	46
2016	2.122.820.934	1.199.049.368	56

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2016

Data tabel di atas mengindikasikan penerimaan realisasi PBB PP yang jauh dari ketetapan yang diharapkan. Di tahun 2015 mengalami penurunan ketetapan tetapi perolehan penerimaan realisasi juga mengalami penurunan, kemudian di tahun 2016 terjadi kenaikan ketetapan target yang harus di capai hingga 3 kali lipat dari ketetapan target PBB PP yang di tentukan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tiga kali lipat ketetapan PBB PP di tahun 2016 tetapi perolehan realisasi PBB PP justru mengalami kenaikan penerimaan dari 46% ke 56% hal ini lah yang membuat

menarik untuk diteliti. Jika dilihat dari data perolehan penerimaan PBB PP per Desa di kecamatan Jati Agung yang terdiri dari 21 desa dengan masing-masing perkembangannya ada yang semakin meningkat, jalan di tempat, dan yang menurun dari tahun sebelumnya seperti data yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Presentasi Penerimaan PBBPP Kecamatan Jati Agung Tahun 2014

No	Nama Desa	2014		
		TP	RP	RP (%)
1.	BanjarAgung	18,4	7,0	38
2.	Fajar Baru	38,2	13,8	36
3.	Gedung Agung	21,1	11,4	54
4.	Gedung Harapan	8,5	3,1	37
5.	Jatimulyo	73,9	39,3	54
6.	Karang Anyar	81,2	49,5	61
7.	Karang Rejo	36,8	7,5	42
8.	Karang Sari	6,7	5,6	83
9.	Marga Agung	34,0	17,6	52
10.	Marga Kaya	20,6	11,1	54
11.	Margo Lestari	13,0	8,8	68
12.	Margo Mulyo	19,5	1,4	8
13.	Margo Rejo	15,0	11,3	75
14.	Margo Dadi	20,5	13,1	64
15.	Purwotani	6,5	3,3	51
16.	Rejomulyo	34,0	28,0	82
17.	Sidodadi Asri	25,4	17,6	70
18.	Sidoharjo	11,7	6,3	54
19.	Sinar Rejeki	35,5	12,5	35
20.	Sumber Jaya	19,1	12,3	64
21.	Way Huwi	61,3	26,1	43
Jumlah		601,1	315,8	52

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2017 (Dalam Juta Rupiah)

TP : Target Penerimaan

RP : Realisasi Penerimaan

RP % : Realisasi Penerimaan dalam Persen

Tabel 1.5
Presentasi Penerimaan PBBPP Kecamatan Jati Agung Tahun 2015

No	Nama Desa	2015		
		TP	RP	RP (%)
1.	BanjarAgung	16,9	3,9	23
2.	Fajar Baru	23,3	6,7	29
3.	Gedung Agung	17,4	11,9	68
4.	Gedung Harapan	7,7	3,1	41
5.	Jatimulyo	80,6	31,9	40
6.	Karang Anyar	72,2	34,3	48
7.	Karang Rejo	32,2	15,3	48
8.	Karang Sari	5,6	2,4	44
9.	Marga Agung	29,3	10,0	34
10.	Marga Kaya	18,6	9,0	48
11.	Margo Lestari	11,5	5,9	52
12.	Margo Mulyo	17,5	5,7	33
13.	Margo Rejo	13,6	10,2	76
14.	Margo Dadi	18,9	9,1	48
15.	Purwotani	6,0	3,1	52
16.	Rejomulyo	30,5	24,5	80
17.	Sidodadi Asri	22,8	11,8	52
18.	Sidoharjo	10,6	5,6	53
19.	Sinar Rejeki	31,5	15,0	47
20.	Sumber Jaya	16,8	9,8	59
21.	Way Huwi	58,2	20,6	35
Jumlah		542,8	250,7	46

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2017 (Dalam Juta Rupiah)

TP : Target Penerimaan

RP : Realisasi Penerimaan

RP % : Realisasi Penerimaan dalam Persen

Tabel 1.6
Presentasi Penerimaan PBBPP Kecamatan Jati Agung Tahun 2016

No	Nama Desa	2016		
		TP	RP	RP (%)
1.	Banjar Agung	54,7	14,5	27
2.	Fajar Baru	110,8	58,6	53
3.	Gedung Agung	57,3	31,9	56
4.	Gedung Harapan	28,6	15,1	53
5.	Jatimulyo	211,8	99,3	47
6.	Karang Anyar	215,3	140,2	65
7.	Karang Rejo	121,6	45,0	37
8.	Karang Sari	52,4	20,1	38
9.	Marga Agung	125,5	99,1	79
10.	Marga Kaya	107,4	70,0	65
11.	Margo Lestari	52,4	38,4	71
12.	Margo Mulyo	83,3	33,2	40
13.	Margo Rejo	51,8	44,3	85
14.	Margo Dadi	87,5	32,3	37
15.	Purwotani	45,9	24,7	54
16.	Rejomulyo	134,1	113,3	85
17.	Sidodadi Asri	110,2	45,9	42
18.	Sidoharjo	66,8	36,5	55
19.	Sinar Rejeki	134,0	113,7	85
20.	Sumber Jaya	85,2	50,4	59
21.	Way Huwi	173,2	71,5	39
Jumlah		2.122,8	1.199,0	56

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2017 (Dalam Juta Rupiah)

TP : Target Penerimaan

RP : Realisasi Penerimaan

RP % : Realisasi Penerimaan dalam Persen

Tabel diatas menunjukkan penerimaan PBB PP dari 21 Desa di Kecamatan Jati Agung dari kurun waktu 2014-2016 dari masing-masing desa menunjukkan tidak selamanya terjadi peningkatan seperti Desa Rejomulyo, Desa Margorejo, Desa Sinar

Rejeki dengan dilihat tingkat perolehan presentasi tertinggi di tahun 2016 sebesar 85% dan ada pula desa yang semakin tahunnya semakin menurun salah satunya Desa Karang Sari dari perkembangan tahun 2014 sebesar 83%, tahun 2015 44%, kemudian tahun 2016 semakin menurun 28%. Juga terdapat 4 desa yang prestasi nya jalan di tempat yaitu Desa Gedung Agung, Desa Purwotani, Desa Sidoharjo, Desa Sumber Jaya dimana perolehan presentasi penerimaan PBB PP tetap di rata-rata sekitar 50%. Kemudian Desa Banjar Agung adalah desa terburuk dengan nilai perolehan yang kecil di tahun 2014 sebesar 36% tahun 2015 23% dan di tahun 2016 semakin mengalami kemrosotan yaitu sebesar 27%. Penerimaan PBB PP di Kecamatan Jati Agung masih belum optimal dapat dilihat dari beberapa desa yang masih ada yang penerimaan PBB PP nya malah mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kemrosotan, padahal pemerintah di Kecamatan Jati Agung sudah melakukan Sosialisasi Perpajakan setiap tahunnya.

Table 1.7
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2014-2016

Jenis Pendapatan	2014	2015	2016
PENDAPATAN DAERAH	1.324,9	1.547,7	1.825,3
PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,5	161,6	184,0
Pajak Daerah	22,4	41,9	51,3
Retribusi Daerah	6,1	8,1	10,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5,5	6,7	6,9
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100,7	104,8	115,0
DANA PERIMBANGAN	1.063,2	1.024,5	1.372,4
Bagi Hasil Pajak	14,2	24,2	33,9
Bagi Hasil Bukan Pajak	6,9	9,5	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	791,8	881,9	1.031,4

Dana Alokasi Khusus (DAK)	100,4	108,8	307,0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	325,4	361,5	268,8
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	8,3

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

(Dalam Juta Rupiah)

Data di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan setiap tahunnya, pada pajak daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2014-2016, pada tahun 2014 pajak daerah menyumbang penerimaan PAD sebesar 22.447.105.19, pada tahun 2015 menyumbang senilai 41.926.015.81 sedangkan pada tahun 2016 adalah 51.372.622.42.

Berdasarkan masalah yang terjadi yaitu wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran dan kurang memahami kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, dan penerimaan PBB PP yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah Kecamatan Jati Agung. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan PBB PP (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”**.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam Mensosialisasikan PBB PP di Kecamatan Jati Agung?
2. Bagaimana Dampak Penerimaan PBB PP Terhadap Peningkatan PAD di Kecamatan Jati Agung?

3. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap PAD Yang Bersumber dari PBB PP?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Menganalisis Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan PBB PP di Kecamatan Jati Agung.
- b. Untuk Menganalisis Dampak Penerimaan PBB PP Terhadap Peningkatan PAD di Kecamatan Jati Agung .
- c. Untuk Menganalisis Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap PAD Yang Bersumber dari PBB PP.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peran pemerintah dalam

mensosialisasikan PBB PP dan dampaknya terhadap PAD perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jati Agung.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB PP dan dampaknya terhadap PAD perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jati Agung.

c. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan dengan peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB PP dan dampaknya terhadap PAD.

F. Metode Penelitian

1. Metode (Pendekatan) Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.¹¹ Atau bisa juga diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan kondisi di lapangan dengan apa adanya.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Alfabeta, Bandung: Cet 15, 2007), h. 11

Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data dan fakta yang dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar, untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan dalam mendapatkan hasil yang objektif tentang peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB PP dan dampaknya terhadap PAD di Kecamatan Jati Agung.

2. Sumber Data

Sumber Data adalah dimana data dapat diperoleh. Oleh karena penelitian ini bersifat lapangan, maka sumber data yang dipergunakan adalah *Field Research*, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk memilih data yang lebih konkrit terkait dengan masalah yang diteliti. Sumber data memiliki dua macam:

- a. Data Primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Barupa kata-kata dan tindakan dari hasil wawancara dengan Informan awal dipilih secara *purposif* (sengaja) yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Informan awal dari penelitian ini adalah Pegawai Kecamatan Jati Agung, selanjutnya dalam mendapatkan data berdasarkan *snow ball sampling* artinya dapat berkembang sesuai data yang diperlukan atau dengan kata lain dimungkinkan untuk menemui informan baru yang lebih khusus lagi.

- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data yang pertama. Data sekunder diperoleh dari buku literatur, Undang-undang, catatan pribadi, dokumen, data statistik atau arsip dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dan kompilasi data serta beberapa laporan penelitian, juga catatan yang relevan dengan obyek penelitian yang memberikan informasi dalam penelitian yang dilakukan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹²

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

¹²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitain Suatu Pendekatan Prakte*, (Rineka Cipta, Jakarta, Ed. Revisi IV, cet 11, 2010), h. 12

keterangan-keterangan.¹³ Arti lain dari Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁵

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dimana Kecamatan Jati Agung memiliki 21 desa dan 21 desa tersebut merupakan populasi dari penelitian ini.

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Bumi Aksara, Jakarta, cet.8, 2007), h. 83

¹⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, Jakarta, cet.3, 2006), h. 113

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, Jakarta, Ed. Revisi IV, cet 11, 2003), h. 14

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung, Cetakan Ke 22, 2015), h. 80

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sekedar acuan-ancuan maka apabila subjeknya kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.¹⁷ Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 maka ditetapkan jumlah sampelnya adalah 21 desa di Kecamatan Jati Agung, dan penelitian ini merupakan penelitian populasi.

5. Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang data secara berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Rineka Cipta, Jakarta, Ed, Revisi IV, Cet 11, 2003) h. 21

c. Sistematika data

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

6. Tehnik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun pustaka, maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai fakta-fakta yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.¹⁹ Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum tentang peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan dampaknya terhadap peningkatan PAD di Kecamatan Jati Agung.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

¹⁸Suharsismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). Hlm. 126

¹⁹Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 32

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang peneliti gunakan yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Eddy Rahma wan (2012)	“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”	Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan limpasu dalam peningkatan pendapatan daerah belum optimal mencapai dari target yang diharapkan. ini disebabkan karena kurang efektif dan efisennya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masihsangat kurang dilakukan.	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu PBB	Penelitian sebelumnya mengambil objek di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Voni Lestari (2014),	“Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan	Dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempengaruhi pendapatan daerah Kota Kediri. Pendapatan daerah mengalami kenaikan, hal ini karena sebelum adanya pengalihan PBB-P2 daerah hanya	Menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu PBB PP dan Penerimaan Daerah	Penelitian sebelumnya mengambil objek di kota Kediri

	Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013”	mendapatkan bagi hasil dari pajak pusat sebesar 64,8% , setelah adanya pengalihan 100% pendapatan dari pembayaran PBB-P2 menjadi pendapatan daerah Kota Kediri.		
Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”	Kesimpulan yang diperoleh adalah dari hasil pengujian asumsi klasik tahap pertama didapat bahwa telah terjadi masalah multikolinieritas dalam model regresi Oleh karena itu diambil langkah untuk mengeluarkan variabel jumlah Wajib Pajak. Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang Sosialisasi Perpajakan	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan Tehnik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda

Sumber: Data diolah 2018

Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eddy Rahmawan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus kepada peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan kontribusi PBB terhadap peningkatan PAD dan memandang dari sisi ekonomi Islam, sedangkan penelitian

yang dilakukan Eddy Rahmawan lebih fokus pada optimalisasi pemungutan pajak PBB PP, dan teknik analisis data yang digunakan berbeda dengan yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan kualitatif dan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif.

Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Voni Lestari adalah, terletak pada fokus penelitiannya, Voni lebih fokus pada pengalihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dan penerimaan daerah kota Kediri, peneliti lebih fokus pada peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan kontribusi PBB terhadap peningkatan perolehan PAD dan memandang seluruh variabel dari sisi ekonomi Islam.

Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian yang dilakukan oleh Marisa dan Herryanto lebih fokus pada pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP pratama Surabaya, dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB dan kontribusi PBB terhadap peningkatan perolehan PAD dan memandang dari sisi ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

UUD 1945 dalam pasal 18 mengatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.²⁰

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh

²⁰²⁰C.S,T Kansil, Christine S.T kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1-2

mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah Daerah, yang dilakanakan dengan Intruksi Mentri Dalam Negri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. UU No. 5 Tahun 1974 kemudian telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.²¹ Setelah lebih kurang 5 tahun berjalan, pada 15 Oktober 2004 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa, pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

²¹*Ibid.*,h. 2

Dengan demikian perjalanan sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditelisik dengan mempelajari undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Namun dengan demikian, seluruh undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah mempunyai arah kebijakan menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.²²

2. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Negara merupakan tugas tunggal yakni untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang pada intinya secara konstitusi tugas dan kewajiban Pemerintah Negara merupakan mandat.²³

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan Ekonomi Islam secara keseluruhan. Tanggung jawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas luas yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dalam menerapkan ajaran Islam. Akan tetapi, beberapa tugas pokok pemerintah antara lain:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat
- b. Pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan
- c. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi

²²Yusmanto, *Pemekaran Kecamatan, Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah* (Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2014), h.4

²³Tumar Sumiharjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 12

d. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi terwujudnya *falah* masyarakatnya.²⁴

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi (Pasal 14):

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyedia sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertahanan
- 12) Pelayanan kependudukan, catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan dasar lainnya, dan

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H. 19

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Daerah yang dimaksud disini adalah sesuai UU No. 31 Tahun 2004, pada Pasal 1 Butir 6 dinyatakan “daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Pasal 1 Butir 6 berhubungan dengan pasal yang mengatur hak dan kewajiban daerah. Hak daerah diatur dalam pasal 21 (UU 32/04), dalam menyelenggarakan otonom, daerah mempunyai 8 hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,
- b. Memilih pemimpin daerah,
- c. Mengelola aparatur daerah,
- d. Mengelola kekayaan daerah,
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah,
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban daerah di dalam pasal 22 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 15 kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,
- c. Mengembangkan kehidupan demokraksi,
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan,
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan,
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan,
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak,
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial,
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah,
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah,
- k. Melestarikan lingkungan hidup,
- l. Mengelola administrasi kependudukan,
- m. Melestarikan nilai sosial budaya,
- n. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Ruang Lingkup Peran Pemerintah

Sesuai dengan fokus permasalahan dan yang menjadi standar untuk mengetahui peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB, menurut

²⁵Tumar Sumiharjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah* (Bandung: Fokusmedia 2008),h. 27-30

Harahap, peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan menurut Veitzhall rivai bahwa peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya peran suatu perbuatan yang diharapkan dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga karena kedudukannya dalam suatu masyarakat, di dalam sebuah kedudukan seseorang atau sekelompok dalam sebuah lembaga dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi anggotanya atau masyarakat. Untuk mendapatkan perubahan yang baik dengan kegiatan yang dilaksanakan, bila peran yang dilaksanakan baik maka perubahan yang baik juga akan didapatkan.²⁶

Secara umum ruang lingkup peran pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membenuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan laju investasi”.²⁷

²⁶ Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamadani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.5, No.2, 2016, h. 72-73

²⁷ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

Menurut Ekonomi Islam ruang lingkup pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi:

- a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
- b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *Falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi *Maslahah*. oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke-*maslahah*-an bagi seluruh masyarakat.²⁸

Dalam sistem ekonomi daerah kepada daerah-daerah otonom (Kabupaten/Kota) diberikan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku pada satu pihak, dan dilain pihak pemerintah daerah diberikan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (disentralisasi fiskal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bentuk lainnya), yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah.

Tugas pokok pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

²⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, h. 459

- a. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan secara lancar, efektif dan efisien
- b. Melaksanakan pembangunan daerah keseluruhan bagian wilayah, dan
- c. Menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah dan bermutu.

Terdapat dua pandangan tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah daerah, yaitu: pertama, menekankan peranan pemerintah daerah yang mencerminkan kemauan dan keinginan masyarakat setempat. Tujuan pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politis, dalam arti pemerintah daerah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah.²⁹

B. Sosialisasi Perpajakan

1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Sosialisasi menurut Mustafa adalah “satu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan

²⁹Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pengembangan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 1

orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif’.

Sosialisasi menurut Rohmawati adalah “suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu”.³⁰

Sedangkan menurut Samudra sosialisasi adalah “bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat dapat diaplikasikan dengan baik yaitu: publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi.

a. Publikasi

Adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak melalui surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya: kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional, dan lain sebagainya.

³⁰Risky Widowati, “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2.No 1, h 5-6

c. Pemberitaan

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana produksi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

d. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

e. Pencantuman identitas

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjukkan sebagai sarana promosi.

f. Pendekatan pribadi

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan Perundang-undangan Perpajakan.³¹

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Sosialisasi diartikan sebagai menyampaikan informasi dan penyampaian pengertian yang baik kepada orang lain, dalam Al-Qur'an terdapat surat Ali-Imran:104 yang menjelaskan mengenai perintah menyampaikan informasi kepada sesama muslim.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung”*

Allah SWT berfirman bahwasannya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk membuat kebaikan dan melarang perbuatan yang mungkar, mereka adalah golongan-golongan orang yang

³¹Risky Riyanda Rama Putra, Siti Ragil Handayani, Dan Topowijono, “Peraruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Di Kantor Pelayanan Pajaak Pratama Singosaru, Kabupaten Malang), “ *Jurnal E-Perpajakan*, Vol. 1 No. 1 2014, h 3-4

beruntung. Makna lain yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini.³²

2. Jenis-jenis Sosialisasi Perpajakan

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak Baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak Terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru, Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali, sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

³²Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*" (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 558

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), *tax gathering*, kelas pajak/ seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop/* bimbingan teknis.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet/ leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/banner/billboard dan sejenisnya,

penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.³³

3. Keputusan Jenderal Pajak No.KEP-114/PJ/2005

Tentang pembentukan Tim Sosalisasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak, maka dipandang perlu dilakukan penyuluhan di bidang perpajakan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan keputusan direktur jenderal pajak tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan di lingkungan direktorat penyuluhan perpajakan.

Mengingat:

- 1) Undang-undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1983 no. 49, tambahan lembaran Negara no. 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 16 tahun 2000 (lembaran Negara republik

³³Agus Arianto Toly dan Marisa Herryanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan", *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013, h. 18

Indonesia tahun 2000 nomor 127, tambahan lembaran Negara nomor 3985)

- 2) Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (lembaran Negara repobklik Indonesia tahun 1983 no. 50, tambahan lembaran Negara no 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 17 tahun 2000 (lembara Negara republik Indonesia tahun 2000 no. 127, tabahan lembaran Negara nomor 3985)
- 3) Undang-undang no. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1983 no. 51, tambahan lembaran Negara no. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 18 tahun 2000 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 no. 128, tambahan lembaran Negara no. 3986)
- 4) Undang-undang no. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (lembar Negara republik Indonesia tahun 1985 no. 68, tambahan lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 12 tahun 1994 (lembar Negara republik Indonesia tahun 1994 no. 62 tambahan embara Negara no. 3569)
- 5) Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang pengalihan pajak dengan surat paksa (lembar Negara republik Indonesia tahun 1997 no. 42, tambahan lembara Negara no. 3686) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan undang-undang no. 19 tahun 2000 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 no 129, tambahan lembaran Negara no. 3987)

- 6) Undang-undang no 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1997 no 44, tambahan lembaran Negara no. 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 20 tahun 2000 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 no. 130, tambahan lembaran Negara no. 3988)

Memutuskan dan Menetapkan keputusan direktur jenderal pajak pembentukan tim sosialisasi perpajakan:

- a. Membentuk tim sosialisasi perpajakan di lingkungan direktorat penyuluhan perpajakan.
- b. Tim sosialisasi perpajakan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan metode dan materi sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak.
 - 2) Melakukan sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak.
 - 3) Meningkatkan pemahaman pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan.
 - 4) Tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur jenderal pajak.
- c. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas tim berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak ini dibebankan pada daftar

alokasi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan direktorat jenderal pajak.

- d. Tim mempunyai masa tugas selama 6 bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada direktur jenderal pajak.
- e. Keputusan direktur jenderal pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.³⁴

C. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Sebelum penulis menguraikan mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, maka ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian pajak secara umum. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁵

Beliau juga menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka

³⁴ www.ortax.org, (31 Mei 2018, 09:57)

³⁵ Indra Isman, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 04

wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda bahkan bisa diberlakukannya pidana kurungan.

Pajak menurut P.J.A Andriani adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pengertiannya dapat dikemukakan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan menurut Siahaan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.³⁶

³⁶Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat), h.116-117

Dengan kata lain, pajak bumi dan bangunan adalah iuran rakyat kepada Negara yang dikenakan kepada mereka yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab dikenal dengan nama *ad-dharibah*, yang berasal dari kata *dharaba*, *yadharibu*, *dharaban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja, sedangkan dalam bentuk kata benda adalah *dharibah* yang dapat diartikan beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.³⁷ Adapun dalil sebagaimana firman Allah dalam Qs, An-Nisaa:29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil.”³⁸

Allah SWT, melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil,

³⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponogoro),

yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-caralainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tatapi dengan cara tipu muslihat. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.³⁹

Al-Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Di dalam definisi yang di kemukakan terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya harta
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara

³⁹ Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*" (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 692

- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).⁴⁰

Dalam segi syariah yang berkaitan dengan Ekonomi Islam maka didapatkan tiga hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- 1) Ada nash Al-Qur'an dan hadis, jika dilihat dari sisi subjeknya pajak bumi dan bangunan ini jelas bertentangan dengan syariah, karena muslim ikut dibebankan atas tanah dan bangunan yang mereka miliki, tempati dan memanfaatkan, padahal mereka adalah pemilik bumi dan bangunan yang terutang dalam firman Allah SWT adalah Qs. Al-Ahzab:27:



وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak (tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam), dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”⁴¹

- 2) Ada pemisahan antara muslim dan non muslim, bahwa atas tanah-tanah taklukan, kaum kafir wajib membayar *kharaj*. Jika dijual kepada kaum muslim, ia tetap dikenakan karena status *kharajiyah* tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi zakat terhadap tanah *kharajiyah* tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi zakat terhadap tanah *kharaj* dan

⁴⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadi* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 999

⁴¹Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 671

tanah *kharajiah* (negeri teklukan yang penduduknya telah masuk Islam) maka disana berlaku *kharaj* samapai kiamat. Setiap penduduk muslim dan non muslim yang memanfaatkan tanah *kharaj* diwajibkan membayar *kharaj* kepada negara.

- 3) Diakarenakan hanya terhadap orang kaya, Pajak Bumi dan Bangunan juga tidak memisahkan orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya yaitu bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan tidak memiliki dasar syariah. Hal ini dapat menimbulkan penindasan dan kezaliman pada kaum muslim, terutama yang lemah. Di Indonesia kaum muslim tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan, dan termasuk juga terhadap non muslim. Karena tanah yang mereka tinggali termasuk tanah *kharajiyah*, *kharaj* termasuk termasuk penerimaan negara resmi non muslim atas tanah *kharajiah*, namun karena Indonesia bukan termasuk tanah *kharajiyah*, maka PBB tidak boleh dipungut.⁴²

Pilihan kewajiban pajak ini telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam, ada yang mengatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

⁴²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi 2* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h, 222-237

- a) Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-kharaj*, menyebutkan bahwa:

Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz, dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

- b) Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahrir bin Hasain kepada anaknya yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi:

Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekaligus itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

c) Hasan Al-Banna, dalam bukunya *majmuatur-rasa'il*, mengatakan:

*Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakan progresif tampaknya seirama dnegan saran-saran Islam.*⁴³

Namun jika kita ikuti pendapat para ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar kemaslahatan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintahan tidak mencukupi untuk membiyai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan paksa dan kekusaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara.

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Subjek pajak

1. Yang menjadi subjek pajak dalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.

⁴³ *Ibid.*,h 156-157

2. Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam no 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada dirjen pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jendral pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila ketentuan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no 4 disetujui, maka direktur jendral pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka direktur jendral pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no 4 direktur jendral pajak tidak

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.⁴⁴

b. Objek pajak

1. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan bangunan,
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak,
- 2) Peruntukan,
- 3) Pemanfaatan,
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berbeda dalam wilayah Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek pajak bumi dan bangunan. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau dikenakan pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai berikut:

⁴⁴Fokusmedia, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h, 153-

- a) Objek pajak yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b) Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengemabalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
- e) Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.⁴⁵

Jelas bahwa objek pajak bumi dan bangunan yang secara nyata digunakan untuk kepentingan umum dalam arti bukan mencari keuntungan maka dibebaskan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan.

4. Cara Menghitung Tarif PBB

Pajak bumi dan bangunan dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{PBB} = 0,5\% \times \text{NJKP}$$

Keterangan:

PBB= Pajak Bumi dan Bangunan

⁴⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 334

NJKP= Nilai Jual Kena Pajak

Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu presentase tertentu dari nilai jual objek pajak sebelumnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk:

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak
- b. Objek pajak lainnya:
 - 1) Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOPnya Rp 1.000.000.000,00 atau lebih
 - 2) Sebesar 20% ddari NJOP apanila NJOPnya kurang dari Rp 1.000.000.000,00.⁴⁶

5. Macam Sanksi Perpajakan

Ada 2 macam sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar:

⁴⁶Hery Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 331-332

a. Sanksi Administrasi

1) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat bayar.

Berbeda dengan bunga utang pada umumnya yang menghitung bunga secara harian dan menerapkan bunga majemuk, pengenaan sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan menghitung bunga secara bulanan atau dihitung 1 bulan penuh dan menerapkan bunga tunggal. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, artinya jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh misalnya 22 juni sd 5 juli dihitung 1 bulan.⁴⁷

2) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

⁴⁷Chairil Anwar Pohan, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), H.135

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau sengaja dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak dilakukan terhadap:

- a) Wajib pajak yang telah meninggal dunia
- b) Wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c) Wajib pajak yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.⁴⁸

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah terutang.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 136

b. Sanksi Pidana

Dalam perpajakan dikenal adanya sanksi pidana. Undang-undang KUP mengatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran undang-undang tersebut diatas adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, h. 137

6. Memahami Keberatan dan Banding dalam PBB (Pasal 15 dan 16 UU PBB)

a. Keberatan

Keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak. Keberatan diajukan kepada kantor pelayanan PBB atau kantor pelayanan pajak pratama yang menerbitkan SPPT atau SKP dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP. Maksud dan tujuan penyelesaian keberatan PBB adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada WP, yaitu menjamin hak WP dan terlaksananya asas keadilan dalam perpajakan. Keberatan PBB adalah:

- 1) Keadaan WP merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, misalnya:
 - a) Salah luas objek PBB
 - b) Salah klasifikasi obbjek PBB
 - c) Salah dalam penetapan/pengenaan
- 2) Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan fiskus.
Contohnya adalah objek pajak yang tidak dikenakan PBB dan penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Tata cara pengajuan surat keberatan:

- a) Diajukan dalam Bahasa Indonesia
- b) Mengemukakan alasan yang jelas dan perhitungan PBB menurut WP

- c) Satu surat keberatan untuk satu objek pajak
- d) Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak

Kepala kantor pelayanan PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya keberatan, baik menerima sebagian/seluruhnya, menolak atau menambah besarnya penetapan. Jika batas waktu 12 bulan telah terlampaui dan keputusan atas keberatan belum dikeluarkan, maka keberatan dianggap diterima seluruhnya.

b. Banding

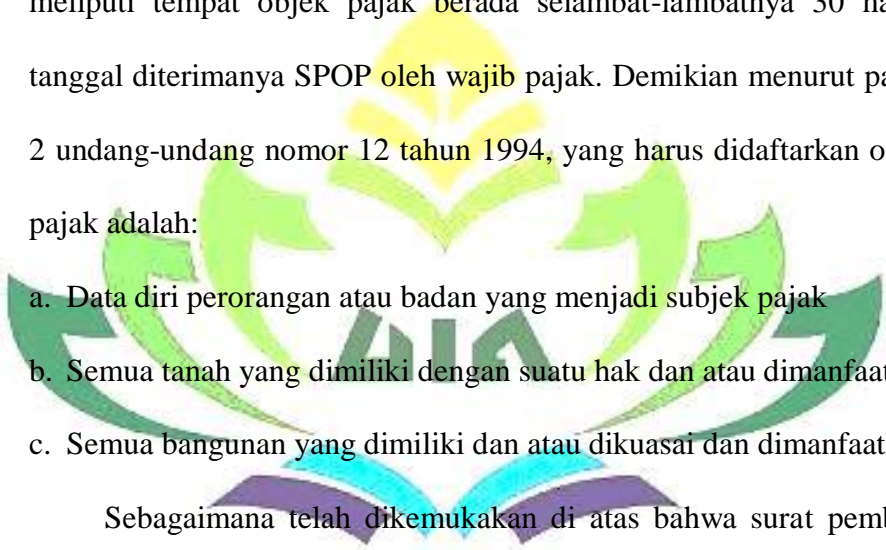
Atas dikeluarkan Surat Keterangan Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima.⁵⁰

7. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran PBB PP

Pada prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola pajak daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (bagi wajib pajak orang pribadi) atau tempat kedudukan (bagi wajib pajak badan) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan atau nomor objek pajak daerah (NODP).

⁵⁰ Harry Prawono., *Op.Cit.*, h. 337-338

Dalam rangka pendaftaran objek pajak, subjek pajak mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diberikan oleh direktorat jendral pajak. Surat pemberitahuan objek pajak tersebut harus di isi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani oleh wajib pajak. SPOP yang sudah diisi harus dikembalikan ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berada selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Demikian menurut pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 1994, yang harus didaftarkan oleh subjek pajak adalah:

- 
- a. Data diri perorangan atau badan yang menjadi subjek pajak
 - b. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan atau dimanfaatkan
 - c. Semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai dan dimanfaatkan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa surat pemberitahuan objek pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu adalah suatu ketentuan, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan salah tafsir sehingga dapat merugikan negara atau wajib pajak itu sendiri, jadi data yang diminta dalam SPOP harus dibuat sedemikian rupa baik data diri perorangan atau badan maupun objek pajak seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan SPOP ini direktorat jendral pajak setempat menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Pajak terhutang berdasarkan

SPPT ini harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Dalam hal SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP tersebut dan telah ditegur secara tertulis tetapi ternyata tidak juga dikembalikan oleh wajib pajak, maka direktorat jenderal pajak menerbitkan surat keterangan pajak (SKP) berdasarkan pemeriksaan dan keterangan lainnya. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yaitu sebesar pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Jika pada saat jatuh tempo (6 bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak) ternyata pajak tidak dibayar atau kurang bayar, maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan. Denda dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Sarana pendaftaran subjek dan objek pajak bumi dan bangunan digunakan surta pemberitahuan objek pajak (SPOP) menurut pasal 9 undang-undang nomor 12 tahun 1994 harus diisi dengan ketentuan:

1. Jelas, maksudnya adalah bahwa penulisan data yang diminta dalam SPOP harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara atau wajib pajak itu sendiri.
2. Benar, artinya data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga

perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pernyataan yang ada pada SPOP.

3. Lengkap, artinya bahwa semua kolom pada SPOP baik yang menyangkut wajib pajak maupun data tanah dan atau bangunan, harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan ditandatangani oleh wajib pajak.
4. Tempat waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani harus dikembalikan ke kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Berdasarkan data hasil pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan akan mengeluarkan atau menetapkan SPPT kepada wajib pajak. SPPT merupakan surat yang dipergunakan oleh dirjen pajak untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya pajak terutang.⁵¹

8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB

- a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak
- b. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

⁵¹*Ibid.*, 335-338

- c. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam poin c diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
- e. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f. Tatacara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan
- g. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak
- h. Jumlah pajak yang terutang berdasar STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU No.19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.⁵²

⁵²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Jakarta: ANDI, 2008), h. 328-329

9. *Kharaj* Metode Pengambilan Pajak Pada Masa Rasulullah

a. *Kharaj*

1) Pengertian *kharaj*

Kharaj atau disebut dengan pajak bumi atau tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, orang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Kharaj menurut bahasa (harafiah) berarti kontrak. Sewa-menyewa atau menyerahkan. Sebagai salah satu *baitul maa*, *kharaj* diterapkan pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab r.a atas tanah yang berhasil dikuasai oleh kaum muslimin.

Di bawah ini adalah dasar hukum *kharaj* terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Mu'minuun: 72 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Atau (jika) kamu meminta upah kepada mereka (orang kafir)?, maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik”(QS. Al-mu'minuun:72)⁵³

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dimengerti bahwasannya *kharaj* itu merupakan upah atas sewa tanah yang dikenakan kepada orang-orang non muslim yang hidup di negara Islam dan ditaklukan

⁵³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), h.

oleh negara Islam. Adapun yang dimaksud dengan kalimat “upah dari tuhanmu” dalam ayat di atas adalah rezeki yang di anugerahkan tuhan di dunmia dan pahala di akhirat.

Kharaj adalah hak kaum muslimin atss tanah yang ditaklukan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun melalui jalan damai, oleh karena itu *kharaj* ada dua macam yaitu:

a) *Kharaj unwah*

Kharaj unwah adalah *kharaj* yang diambil dari semua tanah yang dikusai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang.

b) *Kharaj shulhi*

Kharaj shulhi adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. *Kharaj* ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati di antara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal diatasnya dengan kesediaan membayar *kharaj*, maka *kharaj* berlaku secara permanen atas tanah tersebut.

Sedangkan untuk menetapkan besarnya *kharaj*, khalifah dapat bermusyawarah dengan para ahli yang dapat memperhitungkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya.

Sebagaimana yang dilakukan khalifah umar ketika akan menetapkan *kharaj* atas tanah swad. Maka ketika akan menetapkan *kharaj*, haruslah diperhatikan kondisi tanah tersebut. Pada prinsipnya tidaklah ditetapkan *kharaj* atas pemilik di luar batas kemampuannya.

Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, penggandaan senjata. Juga diberikan kepada para janda, orang yang membutuhkan, serta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat ijtihadnya.⁵⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa *kharaj* merupakan pajak atas bumi dan manfaatnya (hasilnya) yang dikenakan pada non muslim ataupun orang muslim yang berada di wilayah negara kekuasaan muslim.

b. Persamaan dan Perbedaan *Kharaj* dan PBB PP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pada *Kharaj* dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat kesamaan dan perbedaan yang mendasar. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persamaan *kharaj* dan PBB

Secara umum, baik *kharaj* maupun PBB merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat atas pemanfaatan tanah yang

⁵⁴*Ibid.*, 129

dimilikinya. Dengan demikian persamaan dari keduanya dapat dilihat dari objek *kharaj* dan PBB.

- a) *Kharaj* dan PBB merupakan kewajiban yang sama-sama harus dibayarkan kepada pemerintah
- b) *Kharaj* dan PBB dibebankan atas tanah/bumi yang dimiliki dan diambil manfaatnya oleh masyarakat
- c) Dilihat dari kemanfaatannya, objek *kharaj* dan PBB dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan atas fasilitas umum yang dipergunakan untuk kemaslahatan warga.

2) Perbedaan *kharaj* dan PBB

Perbedaan *kharaj* dapat dilihat dari dua aspek baik objek pajak maupun subjek pajak. Diatas telah dijelaskan persamaanya dari segi objek pajak. Namun jika dipahami secara menyeluruh, objek PBB terlihat lebih luas dan komplek dibanding dengan *kharaj*. Dimana *kharaj* dikenakan atas manfaat lahan pertanian atau lahan lainnya yang dimiliki masyarakat non muslim.⁵⁵

Sementara objek PBB mencakup segala lahan baik bumi dan isinya serta bangunan dalam artian yang luas. Timbulnya perbedaan diatas dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan dunia dalam sektor perekonomian dan pembangunan dimana pada awal Islam,

⁵⁵ Adhaar, *Aplikasi Kharaj dan PBB Sebagai Sumber Pendapatan Negara*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan masih terbatas dan belum seluas pada masa sekarang.

Perbedaan lain dari keduanya adalah dapat dilihat dari subjek pajak. Dimana *kharaj* diberikan kepada *ahludz dzimmah* (non muslim) oleh pemerinah Islam dan tidak dibebankan kepada umat islam, sedangkan PBB dibebankan kepada warga Negara baik muslim maupun non muslim.⁵⁶

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam

⁵⁶*Ibid*, h. 34

⁵⁷Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h, 51-52

wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1) Jenis dan Objek Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.⁵⁸

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri dari Sebagai Berikut

- a) Pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan,

⁵⁸ *Ibid.*, h. 53-54

pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

- b) Pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- c) Pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- d) Pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c. objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.
- g) Pajak parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁵⁹

⁵⁹Darwin, MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, sebagai mana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

1) Objek retribusi daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi jasa khusus

Retribusi jasa khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, penganturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup yaitu, pembagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, pembagian

laba atas penyertaan modal pada BUMN, pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut: hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketika, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah. Pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.⁶⁰

3. Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Rasulullah

Pada masa Islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. *Zakat*

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada

⁶⁰Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 73-74

kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode madinah pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.

b. *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain di tanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharraj* yang berbeda.

c. *Khums*

Para ulama *syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubait dalam Adi menyatakan bahwa yang di maksud *khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

d. *Ghonimah* dan *fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.

e. *Jizyah*

Adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam.

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.

Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti *wakaf* (pemberian asset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas), lalu *kalalah* (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara

dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu *sukuk*.⁶¹



⁶¹Nurul Huda dkk, *Keuangan Public Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm, 25-35

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung

1. Letak Geografis Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 21 Desa dengan jumlah penduduk 114.073 jiwa dan 33.323 Kepala Keluarga (KK). Adapun luas wilayah Kecamatan Jati Agung 27.131 Ha dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang. Kecamatan Jati Agung berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan: Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
2. Sebelah selatan berbatasan dengan: Kecamatan Tanjung Bintang
3. Sebelah barat berbatasan dengan: Kecamatan Natar
4. Sebelah timur berbatasan dengan: Kabupaten Lampung Timur.⁶²

2. Sejarah Singkat Kecamatan Jati Agung

Jati Agung adalah sebuah kecamatan yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Jati Agung merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Bintang dan terletak paling utara. Berdasarkan UU Nomor: 22 Tahun 1999, surat Menteri Dalam Negeri No.188.138/1737/PUOD Tanggal 17 Juni 1999 Perihal Petunjuk Pelaksanaan

⁶²*Ibid*

Peraturan Pemerinrah Nomor: 46 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur/KDH TK.I Lampung Nomor: 81 Tanggal 13 Agustus Tahun 1999 dengan Ibu Kotanya Adalah Marga Agung yang meliputi 21 desa.⁶³ Berikut ini adalah nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Jati Agung:

Tabel 3.1
Nama-nama Desa Yang Berada di Wilayah Kecamatan Jati Agung

No	Desa/Kelurahan	Dusun	RT	RW
1.	Banjar Agung	4	8	16
2.	Fajar Baru	7	8	27
3.	Gedung Agung	4	4	8
4.	Gedung Harapan	2	-	4
5.	Jatimulyo	10	20	56
6.	Karang Anyar	16	24	55
7.	Karang Rejo	7	15	29
8.	Karang Sari	8	8	18
9.	Margakaya	4	6	17
10.	Marga Agung	6	7	26
11.	Marga Lestari	4	6	14
12.	Margorejo	4	6	14
13.	Margomulyo	6	12	25
14.	Purwotani	5	5	18
15.	Rejomulyo	6	12	34
16.	Sidoasri	7	15	36
17.	Sinar Rejeki	9	19	49
18.	Sidoharjo	4	8	21
19.	Sumber Jaya	6	6	21
20.	Way Huwi	6	12	34
21.	Margodadi	5	10	20

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2017

3. Topografis

⁶³Dokumen Kantor Jati Agung, 2018

Secara topografis Kecamatan Jati Agung sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah daratan rendah dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut 450 m, masing-masing desa dengan rata-rata ketinggian, untuk Desa Way Huwi memiliki rata-rata ketinggian 400,0 m, Desa Jatimulyo 400,0 m, Desa Fajar Baru 350,0 m, Desa Karang Sari 350,0 m, Desa Karang Anyar 400,0 m, Desa Karang Rejo 350,0 m, Desa Rejomulyo 400,0 m, Desa Marga Kaya 400,0 m, Desa Marga Agung 350,0 m, Desa Marga Lestari 400,0 m, Desa Gedung Harapan 350,0 m, Desa Banjar Agung 350,0 m, Desa Margodadi 400,0 m, Desa Margo Rejo 350,0 m, Desa Gedung Agung 350,0 m, Desa Margo Mulyo 350,0 m, Desa Sidosari 350,0 m, Desa Sumber Jaya 400,0 m, Desa Sidoharjo 450,0 m, Desa Sinar Rejeki 450,0 m, dan Desa Purwotani 500,0 m.⁶⁴

Daerah Jati Agung merupakan daerah pertanian padi sawah tadah hujan, palawija, dan perkebunan rakyat, dengan status tanah kawasan hutan produksi dan tanah marga. Mata pencarian sebagian besar penduduk kecamatan Jati Agung adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan rakyat. Di samping keberhasilan Kecamatan Jati Agung masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan. Kekurangan lapangan pekerjaan ini karena hanya sektor pertanian yang memang menjadi mata pencarian utama dan tidak ada sektor lain kecuali pekerjaan buruh kasar yang tetap pada buruh sektor pertanian.

⁶⁴*Ibid*

Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pra sejahtera atau dengan kata lain kesejahteraan belum merata pada kecamatan ini. Keadaan ini mengakibatkan adanya sebagian masyarakat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Tabel 3.2
Luas Desa di Kecamatan Jati Agung

No	Desa/Kelurahan	Luas	
		Km2	Ha
1.	Banjar agung	4,66	466
2.	Fajar baru	6,40	640
3.	Gedung agung	5,33	533
4.	Gedung harapan	3,65	365
5.	Jatimulyo	10,53	1.053
6.	Karang anyar	46,10	4.610
7.	Karang rejo	45,45	4.545
8.	Karang sari	7,25	725
9.	Marga kaya	5,01	501
10.	Marga agung	10,50	1.050
11.	Marga lestari	10,11	1.011
12.	Marga rejo	4,75	475
13.	Margomulyo	9,16	916
14.	Purwoani	20,02	2.002
15.	Rejomulyo	12,00	1.200
16.	Sodisari	12,97	1.297
17.	Sidoharjo	10,04	1.004
18.	Sinar rejeki	22,11	2.211
19.	Sumber jaya	11,17	1.117
20.	Way huwi	15,35	1.535
21.	Margadadi	6,75	675

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung 2017

Luas kecamatan per desa pada Kecamatan Jati Agung menunjukkan jika setiap Desa memiliki luas wilayah yang cukup, baik untuk pemukiman maupun untuk kegiatan lainnya. Ini terlihat karena setiap desa memiliki luas

wilayah lebih dari 300 Ha dengan wilayah terluas pada desa karang anyar yaitu seluas 4.610 Ha dan wilayah yang memiliki luas wilayah terendah adalah Desa Gedung Harapan dengan luas 365 Ha. Walaupun kedua daerah itu memiliki jarak atau selisih yang jauh namun keduanya sama-sama wilayah yang berada dalam satu Kecamatan dan memiliki keterkaitan dalam berbagai kegiatan perekonomian maupun non perekonomian yang menunjang pembangunan di kecamatan jati agung. Maka dari itu semua desa memerlukan perhatian dari pemerintah setempat untuk memajukan Kecamatan Jati Agung.

4. Demografi

Perubahan penduduk di Kecamatan Jati Agung dalam tiga bulan terakhir ini sangat pesat. Sebagian besar pertambahan tersebut karena perpindahan dari daerah lain. Hal ini dipengaruhi oleh letak Kecamatan Jati Agung yang berbatasan dengan kota madya Bandar Lampung dan pelebaran kota mengarah ke Kecamatan Jati Agung. Dari 21 desa di kecamatan jati agung ada tiga desa yang penduduknya sangat besar yaitu Desa Karang Anyar penduduknya 18.067 jiwa, Desa Jatimulyo penduduknya 15.759 jiwa dan Desa Way Huwi penduduknya 13.692 jiwa.⁶⁵

Ketiga desa ini merupakan desa padat penduduk dengan pertumbuhan penduduk yang memang lebih besar dibandingkan desa lainnya, terlebih ketiga desa ini memang berdekatan dengan pusat kota yaitu Bandar

⁶⁵*Ibid*

Lampung sehingga memudahkan akses masyarakat dalam segala hal baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melakukan kegiatan ekonomi, maupun kegiatan lainnya yang tentu saja lebih mudah jika dilakukan di daerah perkotaan. Lebih jelasnya untuk melihat kepadatan penduduk di kecamatan jati agung dapat dilihat pada table 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.3
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Jati Agung

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km)
1.	Banjar Agung	4,66	2.030	435,62
2.	Fajar Baru	6,40	6.220	971,87
3.	Gedung Agung	5,33	1.429	268,10
4.	Gedung Harapan	3,65	687	188,21
5.	Jatimulyo	10,53	15.642	1.485,47
6.	Karang Anyar	46,10	17.547	380,62
7.	Karang Rejo	45,45	5.381	118,39
8.	Karang Sari	7,25	6.561	904,96
9.	Marga Kaya	5,01	3.080	614,77
10.	Marga Agung	10,50	4.239	403,71
11.	Marga Lestari	10,11	2.934	290,20
12.	Marga Rejo	4,75	1.729	364
13.	Margomulyo	9,16	2.420	264,19
14.	Purwotani	20,02	3.151	327,18
15.	Rejomulyo	12,00	5.737	478,08
16.	Sidosari	12,97	5.510	424,82
17.	Sidoharjo	10,04	2.910	289,84
18.	Sinar Rejeki	22,11	4.234	450,21
19.	Sumber Jaya	11,17	3.770	337,51
20.	Way Huwi	15,35	13.632	888,07
21.	Margodadi	6,75	2.607	386,22

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung 2017

Melihat tabel kepadatan penduduk diatas menunjukkan jika seluruh desa di Kecamatan Jati Agung terdapat pemukiman warga yang dihuni. Kemudian, melihat kepadatan penduduk rata-rata di atas 100 jiwa per km

persegi artinya tiap desa cukup padat penduduknya. Dilain sisi, luas tanah pada tiap desa di Kecamatan Jati Agung memiliki luas yang cukup sehingga sebagai pemukiman dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan lainnya.

Tabel 3.4
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/ kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banjar Agung	1.067	986	2.053
2.	Fajar Baru	3.715	3.704	7.419
3.	Gedung Agung	769	669	1.438
4.	Gedung Harapan	392	307	699
5.	Jatimulyo	7.872	7.887	15.759
6.	Karang Anyar	8.869	9.198	18.067
7.	Karang Rejo	2.629	2.771	5.400
8.	Karang Sari	2.723	2.627	5.350
9.	Marga Kaya	1.616	1.496	3.112
10.	Marga Agung	2.136	2.133	4.269
11.	Marga Lestari	1.383	1.594	2.977
12.	Marga Rejo	912	843	1.755
13.	Margomulyo	1.178	1.245	2.423
14.	Purwotani	1.149	1.129	2.278
15.	Rejomulyo	2.801	2.962	5.763
16.	Sidosari	2.881	2.642	5.523
17.	Sidoharjo	1.462	1.387	2.849
18.	Sinar Rejeki	3.707	2.762	6.469
19.	Sumber Jaya	2.146	2.021	4.167
20.	Way Huwi	6.634	7.058	13.692
21.	Margodadi	1.316	1.295	2.611

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung, Maret 2018

Secara keseluruhan dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin memperlihatkan jika penduduk terbanyak di dominasi oleh wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.

B. Pemerintahan Kecamatan Jati Agung

Dalam pemerintahan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat susunan organisasi dari tatakerja wilayah Kecamatan yang menunjukkan jika dalam melakukan tugasnya, Camat dibantu oleh masing-masing bagian sehingga tugasnya dalam menjalankan pembangunan baik dalam perencanaannya mampu dalam hal-hal lain yang terkait.

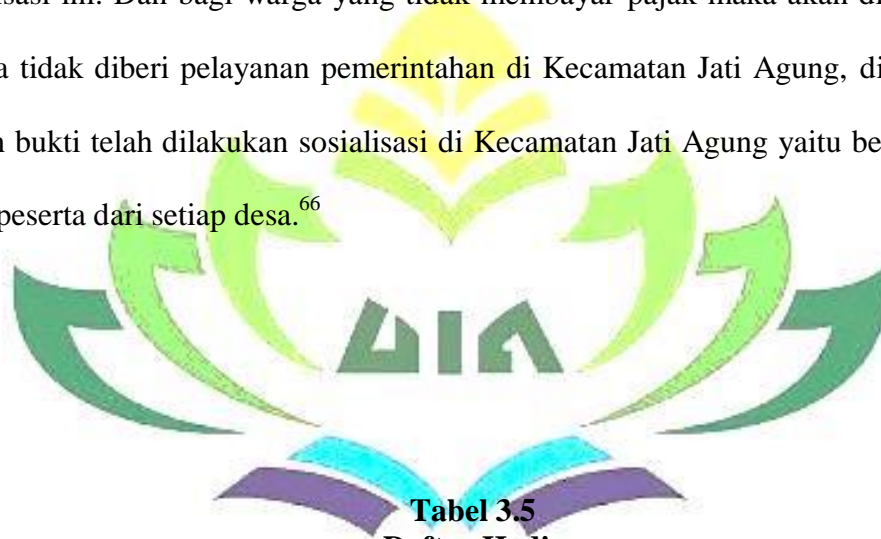
Dalam organisasi ini, Sekertaris Kecamatan dijabat oleh Jumino yang mana ia mengepalai 3 Kasubag Yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum. Kemudian bagian-bagian lain yang langsung melapor kepada camat terdapat 5 bagian ditambah 1 bagian yaitu, Kasi Pemerintahan, Kasi Pertanahan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

Semua bagian-bagian tersebut membantu camat dalam segala hal yang terkait dengan kegiatan di Kecamatan Jati Agung termasuk tentang pengelolaan PBB PP untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Lampung Selatan. Yang mana dalam melakukan tugas-tugasnya bagian-bagian tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari itu seluruh pejabat pemerintahan Kecamatan Jati Agung harus bekerjasama dengan baik agar seluruh kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan.

1. Peran Pemerintah dalam Mensosialisasikan PBB PP

Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pengelolaan PBB di Kecamatan Jati Agung belum mencapai target yang maksimal, telah dilakukan Sosialisasi mengenai PBB tetapi tetap saja penerimaan PBB belum mencapai target,

Sosialisasi mengenai PBB dilakukan setiap tahun sekali di Aula Kecamatan Jati Agung dalam Sosialisasi tersebut dijelaskan cara pembayaran pajak, cara pengisian surat pemberitahuan objek pajak dan menjelaskan Undang-undang Perpajakan jika ada perubahan serta pelaporan hasil penerimaan PBB dari pemungut pajak perdesa ke Pemerintahan Kecamatan Jati Agung, peserta Sosilaisasi adalah pemungut pajak dari setiap desa, dan pemungut pajak dari setiap desa tersebut harus mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dan bagi warga yang tidak membayar pajak maka akan diberi sanksi berupa tidak diberi pelayanan pemerintahan di Kecamatan Jati Agung, di bawah ini adalah bukti telah dilakukan sosialisasi di Kecamatan Jati Agung yaitu berupa daftar hadir peserta dari setiap desa.⁶⁶



Tabel 3.5
Daftar Hadir
Koordinasi Sosialisasi Blangko Pendataan PBB

No	Nama	Desa	No. HP
1.	Pikril	Margodadi	082376587877
2.	Yunani	Fajar Baru	082372423122
3.	Kurniadi	Margo Lestari	085381528074
4.	Mawardi	Rejo Mulyo	081279380638
5.	Wawantoro	Margodadi	085268162549
6.	Sumardi Alwi	Way Huwi	085384627535
7.	Sisko	Jatimulyo	085373825161
8.	Mahmud	Gedung Agung	082183619428
9.	Marwoto	Marga Kaya	085268619143

⁶⁶Wawancara, Febriyanti Putri, Kasi Bidang Kehutanan, Kecamatan Jati Agung, 23 April 2018

10.	Riswanto	Sidodadi Asri	085381118943
11.	Bunyamin	Karang Anyar	081369121547
12.	Apriansyah	Margorejo	085669997679
13.	Richko Saputra	Margo Mulyo	085768728371
14.	Nurohman	Karang Sari	081271782435
15.	Selfi Saputri	Gedung Harapan	082269617702
16.	M. Sodikun	Sumber Jaya	081369661555
17.	Bapak Melan	Gedung Agung	085279867107
18.	Suprayidno	Way Huwi	081273169050
19.	Mulyadi	Sidoharjo	081279147044
20.	Yusuf Ardian	Sidodadi Asri	085378922169
21.	Herman	Sinar Rejeki	085379247408
22.	m. taim	Way huwi	081278110544
23.	Kelik	Karang Anyar	081369121547
24.	Wakidi	Margakaya	085268826662

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Daftar Hadir Sosialisasi Perpajakan Tahun 2018

Dilihat dari Sumber Daya Manusia yang ada dalam hal pengelolaan pemungutan PBB di Kecamatan Jati Agung yaitu ditingkat Kecamatan terdapat 1 Aparat Pemungut PBB kecamatan dalam pengawasan Seksi Pertanahan kemudian dikoordinasikan ketingkat desa. Di desa pemungutan PBB melibatkan Aparat Pemungut PBB pemerintahan desa dan dibantu pamong dan setempat. Dari 21 Kepala Desa di Kecamatan Jati Agung dalam pemungutan PBB semua memutuskan tanggung jawab pada aparat desa yaitu Sekertaris Desa sebanyak 21 orang dan Kepala Dusun 144 orang sebagai Aparat Pemungut Pajak di Desa berikut data Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan disetiap desa di Kecamatan Jati Agung. Jumlah total aparat pemungut pajak di Kecamatan Jati Agung adalah 166 aparat.

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan,

prosedur, serta waktu pembayaran PBB PP. Adanya Sosialisasi perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran parawajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Terdapat pula faktor penghambat yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak di Kecamatan Jati Agung, yaitu faktor *endogen* dan faktor *eksogen*.

Dari faktor *endogen* atau yang biasa disebut faktor diri sendiri, masyarakat cenderung tidak memperdulikan atau apatis hal itu dikarenakan pola pikir masyarakat yang tidak menyadari akan tugas dan kewajibannya, masyarakat merasa pembangunan yang ada di Kecamatan Jati Agung masih kurang sehingga meningkatkan rasa egoisme yang sudah mendasari individu masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan adanya kondisi yang dilihat oleh masyarakat.

Adapun faktor yang berpengaruh besar adalah faktor *eksogen*, dari hasil wawancara bahwa kebanyakan masyarakat yang belum membayar pajak dengan banyak kendala yaitu diantaranya dikarenakan ketidakcocokan antara luas wilayah yang digunakan baik tanah dan bangunan tidak sesuai dengan biaya yang harus dibayar. Selain itu tersiratnya waktu masyarakat untuk bekerja sehingga informasi yang telah disampaikan dari pemerintah desa tidak tersampaikan, hambatan yang paling berpengaruh yaitu faktor ekonomi masyarakat yang tidak seimbang karena ekonomi yang lemahlah yang menjadi ukuran masyarakat dalam membayar pajak⁶⁷.

Peneliti juga mewawancarai aparat pemungut pajak dari beberapa desa mengenai pemungutan PBB di desa yang bersangkutan:

⁶⁷*Ibid*,

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemungut pajak bahwa sosialisasi yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, dan dalam sosialisasi tersebut di jelaskan mengenai tatacara pemungutan pajak, dan menyetorkan pajak ke pemerintah kecamatan, dan undang-undang perpajakan dan sanksi perpajakan, sosialisasi di sampaikan oleh aparat pemungut pajak seksi pertanahan. Setelah dilakukan sosialisasi aparat pemungut pajak lebih memahami tatacara pembayaran PBB. Jika terjadi kendala seperti adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dari tahun ketahun maka pemerintah Kecamatan Jati Agung ikut turun tangan untuk menertibkan wajib pajak yang tidak membayar pajak tersebut.

Menurut Bapak Sugeng yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak di Desa Karang Sari adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bukan saja hanya disebabkan oleh kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, tetapi juga sikap apatis dari masyarakat itu sendiri. Ada juga wajib pajak yang tidak membayar pajak 3 tahun lamanya, dikarenakan objek PBB di wilayah Desa Karang Sari tidak ditempati untuk rumah tinggal dan dikarenakan hanya sebagai investasi dan pembayaran PBBnya tidak di pedulikan oleh yang bersnagkutan.⁶⁸

Menurut Bapak Nurohman selaku kepala dusun 5 dan termasuk aparat pemungut pajak di Desa Jatimulyo, beliau mengatakan kendala yang dihadapi aparat pemungut pajak adalah karena luasnya daerah Desa Jatimulyo diperlukan bantuan koordinasi dengan petugas kabupaten badan pengelola pajak dan retribusi daerah

⁶⁸Wawancara, Bapak Sugeng, Aparat Pemungut Pajak, Desa Karag Sari, 18 Juli 2018

kabupaten lampung selatan untuk dilakukan survey lapangan kembali dikarenakan masih terdapat SPOP yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan akibat mutasi kepemilikan, pemecahan bidang tanah, dan pengajuan baru kepemilikan objek pajak.⁶⁹

Menurut Bapak Sulistiyoko selaku sekertaris desa dan aparat pemungut pajak di Desa Purwotani beliau mengatakan objek pajak yang dimiliki oleh Ibu Supiah salah satu wajib pajak belum memiliki surat kepemilikan tanah yang sah karena memang daerah yang mereka tempati merupakan tanah milik pemerinah yang tidak bisa mereka miliki secara administrasi pertanahan yang sah jadi terkadang tagihan SPPT PBB tidak dibayarkan karena tanah yang dimiliki kepunyaan pemerintah.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Jati Agung dengan Bapak Jafar Sekertaris Desa Sidosadi Asri yang merupakan aparat pemungut pajak di Desa Sidodadi Asri, beliau mengatakan terdapat peraturan baru sesuai Perbup nomor 26 tahun 2016 ketetapan minimal pajak PBB Rp 45.000 unuk satu tahun. Adanya ketetapan batas minimal pajak PBB ini maka tidak ada lagi pembayaran PBB di bawah Rp 45.000, banyak wajib pajak yang kaget dan protes dan mempertanyakan bagaimana cara Pemda Lampung Selatan menghitung PBB karena pembayaran yang dilakukan sama rata walaupun luas yang berbeda, tapi sama-sama

⁶⁹Wawancara, Bapak Nurohman, Aparat Pemungut Pajak, Desa Jatimulyo, 18 Juli 2018

⁷⁰ Wawancara, Bapak Sulistiyoko, Aparat Pemungut Pajak, Desa Puwotani, 18 Juli 2018

membayar Rp 45.000 sehingga Aparat Pemungut pajak mengalami kerepotan karena adanya protes dari wajib pajak karena peraturan baru tersebut.⁷¹

2. Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB dan PAD di Kecamatan Jati Agung

Untuk memperjelas mengenai Ketetapan dan realisasi penerimaan PBB dan PAD di Kecamatan Jati Agung dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Persentasi Realisasi Penerimaan PBB PP Kecamatan Jati Agung Tahun 2014 s.d 2016

Tahun	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2014	601.159.640	315.817.568	52
2015	542.851.178	250.771.548	46
2016	2.122.820.934	1.199.049.368	56

Sumber: Jati Agung dalam Angka 2016

Tabel diatas merupakan data ketetapan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Jati Agung yang sudah dicapai dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 s.d 2016

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1.	2014	130.597.754.290
2.	2015	161.645.901.760
3.	2016	184.063.778.380

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

⁷¹Wawancara, Bapak Jafar, Aparat Pemungut Pajak Desa Sisodadi Asri, 18 Juli 2018

Tabel diatas merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Penerimaan Pendaptan Asli Daerah salah satunya yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi yang diberikan PBB PP terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat di pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Kontribusi PBB pada PAD Kabupaten Lampung Selatan

No	Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	Presentase
1.	2014	315.817.568	130.597.754.290	0,24%
2.	2015	250.771,548	161.645.901.760	0,15%
3.	2016	1.199.049.368	184.063.778.380	0,65%

Sumber: Data diolah 2018

Data diatas merupakan data yang memperlihatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Pemerintah dalam Mensosialisakan PBB PP di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Wajib pajak membutuhkan Sosialisasi perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataanya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak. Wajib pajak yang berpendidikan rendah dan buta prosedur pajak, sebagian besar mereka tidak membayar pajak selama bertahun-tahun.

Keputusan Jenderal Pajak No.KEP-114/PJ/2005 Tentang pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak Memutuskan dan Menetapkan keputusan direktur jenderal pajak pembentukan tim sosialisasi perpajakan:

- f. Membentuk tim sosialisasi perpajakan di lingkungan direktorat penyuluhan perpajakan.
- g. Tim sosialisasi perpajakan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 5) Menyiapkan metode dan materi sosialisasi perpajakan kepada peajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak.
 - 6) Melakukan sosialisasi perpajakan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak.
 - 7) Meningkatkan pemahaman pelajar, mahasiswa dan masyarakat wajib pajak tentang perpajaka.
 - 8) Tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur jenderal pajak.

- h. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas tim berdasarkan keputusan Direktur Jenderal pajak ini dibebankan pada daftar alokasi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan Direktorat Jenderal Pajak.
- i. Tim mempunyai masa tugas selama 6 bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada direktur jenderal pajak.
- j. Keputusan direktur jenderal pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sosialisasi menurut Rohmawati adalah “suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu, sedangkan Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan Perundang-undangan Perpajakan.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak Baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak Terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru, Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali, sedangkan kegiatan

sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

3. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis.

4. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet*/ *leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet*/ *leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/banner/billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi diartikan sebagai menyampaikan informasi dan penyampaian pengertian yang baik kepada orang lain, dalam Al-Qura terdapat surat Ali Imran:104 yang menjelaskan mengenai perintah menyampaikan informasi kepada sesama muslim.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung” (Qs. Ali imran:104)*

Allah SWT berfirman bahwasannya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk membuat kebaikan dan melarang perbuatan yang mungkar, mereka adalah golongan-golongan orang yang beruntung. Makna lain yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk

mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini.⁷²

Peran pemerintah dalam mensosialisasikan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal ini peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, peran merupakan fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, dapat disimpulkan peran merupakan suatu perbuatan yang diharapkan dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok karena kedudukannya dalam suatu masyarakat, didalam sebuah kedudukan seseorang atau sekelompok dalam sebuah lembaga dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi anggotanya atau masyarakat.

Peran pemerintah Kecamatan Jati Agung dalam melakukan kegiatan sosialisasi adalah dengan mengadakan sosialisasi secara langsung dengan berinteraksi langsung dengan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat dari setiap desa, yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya.

Sosialisasi dilakukan satu tahun sekali, sosialisasi yang dilakukan berupa cara pengisian SPOP, SPT, peningkatan kinerja pemungut pajak di setiap desa, cara pembayaran pajak, penjelasan tugas-tugas pemungut pajak dari setiap desa, dan penyampaian undang-undang yang mengatur perpajakan, dan penyampain perubahan

⁷² Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*" (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.558

undang-undang jika ada. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar wajib pajak lebih memahami kewajibannya untuk membayar pajak, dan jika semua wajib pajak patuh membayar pajak maka akan meningkatkan PAD dan meratanya pembangunan.

Sosialisasi di Kecamatan Jati Agung masih kurang maksimal di karenakan penerimaan PBB setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, dan penerimaan PBB setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Jati Agung. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Jati Agung

Tahun	Ketetapan(Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase(%)
2014	602.159.640	315.817.568	52
2015	542.851.178	250.771.548	46
2016	2.122.820.934	1.199.049.368	56

Sumber: Jati Agung dalam 2016

Seharusnya setelah dilakukan sosialisasi maka wajib pajak lebih memahami mengenai prosedur pembayaran PBB dan penerimaan PBB dapat meningkat atau mencapai target yang telah di tetapkan. Jika penerimaan PBB meningkat maka otomatis akan meningkatkan pendapatan PAD Kabupaten Lampung Selatan.

B. Dampak Penerimaan PBB PP Terhadap Peningkatan PAD di Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber-

sumber pembiayaan, yang salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.

Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan peningkatan jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jati Agung. Pajak bumi dan bangunan sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan bentuk dan bukti perwujudan kegotong royongan masyarakat wajib pajak dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak terbesar di Kabupaten Lampung Selatan menjadikan pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

e. Pajak daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Jenis dan Objek Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut:

- e) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- f) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- g) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- h) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.⁷³

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebagai berikut:

- h) Pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- i) Pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- j) Pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- k) Pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- l) Pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- m) Pajak pengambilan bahan galian golongan c. objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.

⁷³*Ibid.*, hlm. 53-54

- n) Pajak parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁷⁴

f. Retribusi Daerah .

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

2) Objek retribusi daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

d) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

e) Retribusi jasa khusus

⁷⁴Drs. Darwin, MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hlm. 119-128

Retribusi jasa khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

f) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, penganturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

g. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup yaitu, pembagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, pembagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, pembagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

h. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut: hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro,

sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah. Pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD dan pendapatan lain yang sah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Berlakunya undang-undang tersebut menjadikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB PP dari pajak pusat menjadi pajak daerah serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB PP menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB PP.

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat keberadaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek

pajak yaitu bumi/tanah dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau tanah/bangunan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Pasal No 12 Tahun 1994, yaitu:

“yang menjadi objek pajak adalah bumi/bangunan”

Pengertian bumi/bangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 adalah:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada BAB II tentang objek pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi/bangunan yang apabila dipahami secara menyeluruh meliputi permukaan bumi yang segala yang ada di bawahnya seperti sawah, lading, tambak dan lain-lain, dan segala yang melekat di atas tanah atau perairan seperti konstruksi bangunan, hotel, perusahaan, rumah, dan lain-lain.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan bangunan.
- b) Memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
- c) Memiliki bangunan

d) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian subjek pajak dapat dipahami semua orang atau badan usaha yang memiliki hak atas bumi dan bangunan dan memperoleh manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila orang atau badan usaha telah memiliki dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan maka ia wajib untuk menunaikan pajaknya dan wajib bagi Negara untuk menarik pajak kepada mereka. Apabila mereka tidak menunaikan pajaknya, maka pemerintah dapat secara paksa menariknya.

Setelah data terkumpul maka akan diuraikan untuk mengetahui perbandingan antara target yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi yang dicapai dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan keadaan presentase target penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam 3 tahun terakhir seperti pada tabel 4.1 diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang pajak bumi dan bangunan mengalami pencapaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2016 yaitu mencapai 56%. Sedangkan untuk realisasi paling kecil sebesar 46% pada tahun 2015 hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan pada tahun 2015 lebih sedikit bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015.

Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti di bawah ini. Pada tahun 2014 diperoleh presentase sebesar 52% dilihat dari jumlah

realisasi sama dengan jumlah target yang ditetapkan. Tahun 2015 mengalami penurunan diperoleh sebesar 46%, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 56%.

Tabel 4.2
Kontribusi PBB pada PAD Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	PBB (Rp)	PAD (Rp)	Persentase
2014	315.817.568	130.597.754,290	0,24%
2015	250.771.548	161.645.901,760	0,15%
2016	1.199.049.368	184.063.778,380	0,65%

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,24%, pada tahun 2015 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan sehingga yang diperoleh hanya sebesar 0,15%, dan pada tahun 2016 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan sehingga yang diperoleh sebesar 0,65%. Dampak penerimaan dari sektor PBB cukup baik namun setiap tahunnya masih fluktuatif. Penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya belum mencapai target yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik bahwa pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang di patuhi oleh masyarakat wajib pajak.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak nasional yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan sistem perpajakan nasional. Berdasarkan

penjelasan tersebut penerimaan pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan membiayai dan melaksanakan tugas pembangunan maka yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu penerimaan daerah yang di dalamnya terdapat PAD yang sumbernya diperoleh dari pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan sosial.

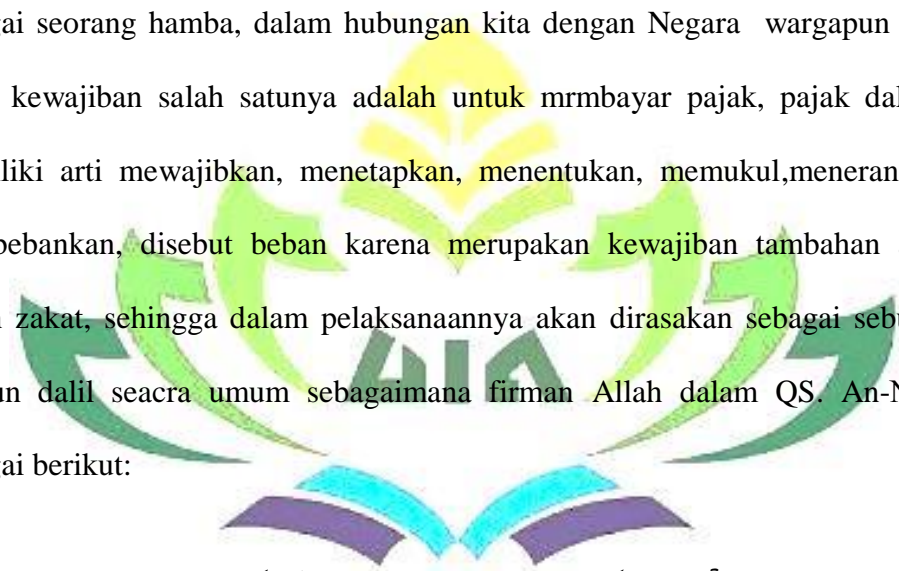
Tinggi rendahnya kontribusi PAD dalam bidang pajak bumi dan bangunan bergantung dari optimalisasi penerimaan PAD bidang pajak, Atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran dalam pembangunan daerah. Seperti kita ketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak atau kurang bayar maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari PBB yang tidak atau kurang bayar, denda administrasi dihitung dari saat jatuh tempo samapai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

C. Pandangan Islam Mengenai PAD yang Bersumber dari PBB PP

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar, dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia

bangun tidur sampai tidur lagi jelas bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Islam tentunya tidak hanya menyangkut masalah hubungan kita dengan Allah namun juga menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Dalam hubungan kita dengan Allah kita mengenal yang namanya ibadah *mahdah* contohnya adalah zakat, puasa, shalat, dan lainnya yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dalam hubungan kita dengan Negara walaupun memiliki suatu kewajiban salah satunya adalah untuk membayar pajak, pajak dalam Islam memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa': 29 sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa': 29)

Allah SWT, melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-

caralainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tatapi dengan cara tipu muslihat. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.⁷⁵

Para ulama memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar kemaslahatan, maka pajak saat ini memang merupakan suatu kewajiban warga Negara, dalam sebuah Negara muslim, dengan alasan dana pemerintahan tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan paksa melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

d) Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-kharaj*, menyebutkan bahwa:

Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu yusuf mendukung hak penguasa

⁷⁵ Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*" (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 692

untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

- e) Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahrir bin Hasain kepada anaknya yang menjadi seseorang gubernur di salah satu provinsi:

Oleh karena itu, sabarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekaligus itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

- f) Hasan Al-Banna, dalam bukunya *majmuatur-rasa'il*, mengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakan progresif tampaknya seirama dnegan saran-saran Islam.⁷⁶

Namun jika kita ikuti pendapat para ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar kemaslahatan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pmerintahan tidak mencukupi untuk membiyai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itutidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah

⁷⁶ *Ibid.*,h 156-157

suatu kemudharatan adalah juga kewajiban. Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan paksa dan kekusaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara.

Metode pengambilan pajak pada masa Rasulullah adalah menggunakan *kharaj*, *kharaj* atau disebut pajak bumi atau tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, orang dewasa, seorang bebas, budak, muslim atau non muslim. *Khara jibarat* kontrak atau sewa-menyewa. *Kaharaj* merupakan sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah, Selain *kharaj* sumber penerimaan pada Rasulullah juga ada *jizyah*, *khums*, zakat, *ghanimah* dan *fa'i*.

Di bawah ini adalah dasar hukum *kharaj* terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minuun: 72 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمَرَ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Atau (jika) kamu meminta upah kepada mereka (orang kafir)?, maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik”(QS. Al-mu'minuun:72)

Menurut Al-Hasan, bahwasannya *kharaj* itu merupakan upah atas sewa tanah yang dikenakan kepada orang-orang non muslim yang hidup di Negara Islam dan ditaklukan oleh Negara Islam. Adapun yang dimaksud dengan kalimat “upah dari tuhanmu” dalam ayat di atas adalah rezeki yang di anugerahkan tuhan di dunmia dan pahala di akhirat.

Sedangkan menurut Qatadah yaitu imbalan. Yakni kamu tidak meminta sesuatu upah pun dari mereka, tidak pula suatu imbalan pun atau sesuatu yang lain sebagai balasan dari dakwahmu kepada mereka yang menyeru mereka kepada petunjuk. Bahkan engkau hanya mengharapkan imbalan dari Allah semata atas hal tersebut, yaitu pahala yang berlimpah dari-Nya.⁷⁷

Dalam hal ini *kharaj* dan PBB memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan *kharaj* dan PBB dapat dilihat secara umum, yaitu baik *kharaj* dan PBB merupakan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat atas pemanfaatan tanah yang dimilikinya. Sehingga persamaan dari keduanya dapat dilihat dari objek *kharaj* dan PBB yaitu sama-sama harus dibayarkan kepada pemerintah, dibebankan atas tanah/bumi yang dimiliki dan diambil manfaatnya oleh masyarakat, dilihat dari kemanafaatannya *kharaj* dan PBB dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan atas fasilitas umum yang dipergunakan untuk kemaslahatan warga, *kharaj* dan PBB juga sumber penerimaan Negara.

Sedangkan perbedaan *kharaj* dapat dilihat dari dua aspek baik objek maupun subjeknya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai persamaannya, namun jika dipahami secara menyeluruh, objek PBB terlihat lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan *kharaj*, dimana *kharaj* dikenakan atas manfaat lahan pertanian atau lahan lainnya yang dimiliki masyarakat non muslim. Sementara objek PBB mencakup segala lahan baik bumi dan isinya serta bangunan dalam artian yang luas.

⁷⁷ Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h

Perbedaan lain dapat dilihat dari subjeknya, subjek *kharaj* diberlakukan kepada non muslim oleh pemerintahan Islam dan tidak dibebankan kepada umat Islam, sedangkan PBB dibebankan kepada warga Negara baik itu muslim maupun non muslim.

Sudah terlihat jelas persamaan dan perbedaan PBB dan *kharaj*, dalam Islam *kharaj* diperbolehkan dan digunakan untuk memperoleh pendapatan Negara pada masa Rasulullah, maka PBB pun diperbolehkan dalam Islam selama penarikan PBB sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak menggunakan cara yang bathil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan memberikan kesimpulan dan saran agar selanjutnya upaya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik lagi dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan kewajibannya sebagai wajib pajak:

1. Sosialisasi adalah hal yang sangat penting dilakukan demi terciptanya wajib pajak yang patuh membayar pajak, dapat dilihat dari data realisasi penerimaan PBB bahwa jumlah penerimaan PBB dari tahun 2014-2016 belum mencapai target yang ditetapkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Jati Agung sudah cukup baik karena telah melakukan sosialisasi satu tahun sekali dan melibatkan seluruh lini lapisan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa penghambat yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak yaitu faktor *endogen* dan *eksogen*.
2. Dampak PBB sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD meski di tahun 2015 mengalami penurunan, PBB berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah yang berkontribusi selama 3 tahun terakhir. Yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,24%, pada tahun

2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,15%, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,65%.

3. Pandangan Ekonomi Islam mengenai PAD yang bersumber dari PBB, dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan antara *Kharaj* dan PBB terlihat dari objek dan subjek pajaknya, dilihat dari objek *kharaj* dan PBB merupakan kewajiban yang di bebankan atas pemanfaatan tanah yang dimilikinya dan di ambil manfaatnya oleh masyarakat, harus dibayarkan kepada pemerintah. Dalam Islam *kharaj* di perbolehkan dan digunakan untuk memperoleh pendapatan Negara pada masa Rasulullah, maka PBBpun di perbolehkan dalam Islam selama penarikan PBB sesuai dengan aturannya pemerintah dan tidak menggunakan cara yang bathil.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pengelola pajak bumi dan bangunan agar dapat mengelola pajak bumi dan bangunan lebih baik dan ditingkatkan keprofesionalannya. Pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang pajak sehingga masyarakat tidak ragu dengan uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk apa, sehingga masyarakat wajib pajak tidak akan enggan dalam membayar pajak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih enggan dalam membayar PBB lebih dapat diperhatikan oleh pemerintah demi meningkatkan penerimaan PBB dengan melakukan upaya yang lain seperti, perlunya

melakukan sosialisasi secara lebih detail kepada seluruh wajib pajak, kembangkan sistem yang lebih terbuka atau transparan.

3. Penerimaan PBB harus terus ditingkatkan oleh pemerintah hingga mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sehingga PBB dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adhaar, *Aplikasi Kharaj dan PBB Sebagai Sumber Pendapatan Negara*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011

Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pengembangan Daerah*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011

Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, Jakarta: 2011

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: Ed, Revisi IV, Cet 11, 2003

-----, *Prosedur Penelitain Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: Ed. Revisi IV, cet 11 , 2010

Darwin, MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005

Dokumen Kantor Jati Agung 2018

Edwin Musthafa Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007

Fokusmedia, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2009

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Huda Nurul dkk, *Keuangan Public Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012

Isman Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010

Jhingan M.L, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: ANDI, 2013

Narbuko Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: cet.8, 2007

Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*", Jakarta: Gema Insani, 1999

Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta: cet.3, 2006

Pohan Anwar Hairil, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Purwono Hery, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2014

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007

Sudjana Nana, *Pedoma Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, Cet 15, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cetakan Ke 22*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sumiharjo Tumar, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2008

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2014

Widjaja A.W., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

-----, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Yusmanto, *Pemekaran Kecamatan, Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014

Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007

Jurnal:

Napitupulu Lucia S., Novi Budiarto, “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado” *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 Maret 2015

Pradita Ferian Dana, Imam Suyadi, dan Muhammad Faisal Riza, “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”, *Jurnal Perpajakan*

Rama Risky Riyanda Putra, Siti Ragil Handayani, dan Topowijono, “Peraruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang), *Jurnal E-Perpajakan*, Vol. 1 No. 1 2014

Robertus Rinti dan Emei Dwinanarhati Setiamadani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.5, No.2, 2016

Toly Agus Arianto dan Marisa Herryanto, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013

Widowati Risky, “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2.No 1, 2015

Situs:

www.ortax.org (31 Mei 2018, 09:57)



